

## **Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi Atau Negara Islam**

Bismar Arianto

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Mahasiswa Ilmu Politik S3 FISIP Universitas Indonesia

mrongahbismar@gmail.com

### **ABSTRAK**

Artikel ini berupaya memahami Forum Pembela Islam (FPI) dalam konteks gerakan Islam. Pemahaman terhadap FPI menjadi penting sebab FPI termasuk gerakan politik berbasis nilai Islam yang termasuk berpengaruh secara politik di Indonesia. Pemahaman terhadap FPI perlu mengkaji dari segi tipologi pemikiran politik sebab itu akan menjadi alasan FPI selama ini bergerak sebagai gerakan politik. Tipologi pemikiran FPI menjadi hal menarik jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai relasi Islam dengan politik termasuk kedudukan Islam dalam teori negara.

Kata Kunci: FPI, Pemikiran, Negara, Gerakan Politik

### **Pendahuluan**

Gerakan politik Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi eksternal. Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi gerakan Islam di Indonesia adalah gerakan pembaruan yang tumbuh di Timur Tengah. Gerakan modernisme di Indonesia mendapatkan inspirasi purifikasi Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Jazirah Arabia dan Pan Islamisme Jamaluddin al-Afghani yang kemudian mendapat kerangka ideologis dan teologis dari muridnya seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Rihda.

Dinamika perubahan dan pembaruan di Timur Tengah itu disebabkan oleh tiga hal. Pertama, kesadaran internal yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Kedua, kemajuan bangsa barat dalam bidang sains dan teknologi pada masa renaissance. Ketiga, kondisi negara-negara arab yang mengalami kemunduran di era imperealisme<sup>1</sup>.

Dinamika yang terjadi di Timur Tengah ini juga memberi pengaruh terhadap perkembangan gerakan Islam di sejumlah negara di dunia termasuk juga Indonesia. Pola pengaruhnya dapat dikelompokkan kedalam tiga pola, yaitu

---

<sup>1</sup> Nur Khakim, *Islam : Doktrin Pemikiran dan Realitas Historis*, Adintya Press, Yogyakarta, 2002, hal 68

modernisme, revivalisme dan tradisionalisme<sup>2</sup>. Pola modernisme. Pola ini menginginkan ada perpaduan kemajuan sains dan teknologi yang di Barat dengan nilai-nilai keislaman, dimana memahami Islam tetap merujuk kepada Quran dan Sunnah dengan pendekatan yang lebih bersifat kontekstual, dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman. Pijakkan dasarnya tetap Quran dan Sunnah namun digali dalam kondisi kekinian. Revivalisme sepenuhnya ingin kembali pada ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist seperti pada masa nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali), serta tidak menerima perkembangan intelektualisme yang berakar dari pemikiran barat. Tradisionalisme menganggap bahwa manusia sudah mulai lalai dengan ajaran Islam serta pada posisi yang kritis maka mengharuskan kembali pada nilai-nilai keislaman serta mengakomodir (menyesuaikan) nilai-nilai adat istiadat (budaya lokal) dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al Quraan dan Hadist.

Sedangkan menurut Deliar Noer Pergerakan Islam di Indonesia bisa dilacak pada era awal abad 20 yaitu sekitar tahun 1900-1940. Pada periode ini gerakan Islam di Indonesia dapat dibagi dua kelompok. Pertama, semangat pemurnian agama yang dilakukan oleh gerakan pembaru Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persis. Kedua, mempertahankan tradisi bermazhab terutama dalam bidang fiqh yang dilakukan oleh gerakan tradisional NU dan al-Washliyah<sup>3</sup>.

Dalam analisa Khoirul Huda dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia terdapat fenomena pergeseran konflik dari Tradisionalis-Modernis ke Liberalis-Fundamentalis. Khoirul Huda membagi dalam empat kelompok besar pergeseran tersebut. Pertama, modernis bisa dilihat pada Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis. Kedua, tradisional pada kasus NU dan Perti. Ketiga, libereral seperti Lakspesdam NU, LKiS, LKPSM, P3M, JIL, eLSAD, JIMM, PSAP, al -Maun &

---

<sup>2</sup> Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1993, hal 8-13

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1980), lihat dalam bagian pendahuluan

Ma'arif Institut dan keempat, fundamentalis seperti pada FPI, Laskar Jihad FKAW, MMI, HTI, KAMMI, HAMMAS<sup>4</sup>.

Gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia sudah muncul sejak golongan Islam formalis menuntut pemberlakuan syariah secara formal di dalam konstitusi Indonesia dan menginginkan terbentuknya Indonesia menjadi negara Islam. Dalam panggung politik awal kemerdekaan Indonesia, golongan ini diwakili oleh mereka yang menentang penghapusan kalimat terakhir dalam Piagam Jakarta 1945 yang menyatakan adanya “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”<sup>5</sup>.

Dalam perkembangan gerakan radikal ini kembali menguat pasca tumbangannya rezim Orde Baru. Kondisi ini tergambar dari munculnya beberapa partai Islam, organisasi-organisasi Islam dan maraknya gerakan Islam radikal seperti Front Pembela Islam, Laskar Jihad, dan lain sebagainya yang menyuarakan penegakan syariah Islam dan bersuara keras terhadap paham-paham dan pemikiran yang mereka anggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam seperti Ahmadiyah dan Syiah<sup>6</sup>.

Artikel ini akan membahas tentang gerakan Front Pembela Islam. Tulisan ini akan membedah dua hal terkait FPI yaitu tentang pola gerakan FPI dan pandangan atau konsep negara Islam yang dikaitkan dengan gerakan FPI. Karena dalam visi dan misi FPI secara tegas menyatakan ingin menerapkan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan Da'wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad.

### **Lahirnya Front Pembela Islam**

Front Pembela Islam (FPI) dideklarasikan oleh Habib Rizieq Shihab, Habib Idrus Jamalullail, Kiai Misbach, dan beberapa ulama lain. Berdiri pada

---

<sup>4</sup> Khoirul Huda, Fenomena Pergeseran Konflik Pemikiran Islam Dari Tradisionalis Vs Modernis Ke Fundamentalists Vs Liberalis, Jurnal ISLAMICA, Vol. 3, No. 2, Maret 2009, hal 38

<sup>5</sup> Endang Saifuddin Anshari, dalam Saeful Anwar, *Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'ruh Nahy Mungkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2014; issn 2088-7957; 220-250, hal 221

<sup>6</sup> Ibid hal 222

tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren al-Umm, di daerah Kampung Utan-Ciputat, kediaman KH. Misbachul Anam. Pendirian ini karena merasa prihatin terhadap kondisi umat dan bangsa Indonesia pasca reformasi.

Pertimbangan pendirian FPI bisa dilihat dalam dalam risalah historis dan garis perjuangan FPI, dimana ada tiga pertimbangan pendirian FPI yaitu ; pertama, adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia sebagai akibat adanya penyelenggaraan HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Kedua, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Ketiga, adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk dapat menegakkan amar ma'rûf nahy munkar<sup>7</sup>.

Banyak alasan pendirian FPI diantaranya, pertama, rasa tanggung jawab para tokoh Islam kepada Allah, dan Rasulnya, dari adanya sebuah kehancuran umat yang semakin tidak jelas. Kedua, kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, kurangnya kontrol sosial baik dari penguasa sipil maupun militer, dan pemerintah terhadap hak-hak Muslim sebagai mayoritas di negeri ini<sup>8</sup>. Dari tiga alasan ini terlihat bahwa pendirian FPI ada bagian dari pertanggungjawaban manusia sebagai pemimpin didunia, kemudian panggilan untuk untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk dalam masyarakat, pada posisi ini dalam pandangan FPI kemaksiatan banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat namun tidak ada upaya signifikan untuk mencegah atau melarang kemaksiatan itu, ditambah dengan semakin lemahnya eksistensi negara dalam menagakkan aturan pada awal-awal reformasi. Maka dengan kondisi seperti ini umat Islam harus berperan dalam mengatasi kemaksiatan.

Pandangan sebelumnya tentang alasan pendirian FPI juga dibenarkan oleh S Yunanto, yang mengatakan bahwa FPI lahir sebagai upaya untuk mewujudkan eksistensi dan kehormatan umat islam yang terkoyak, yang selama Orde Baru perannya dipinggirkan bahkan ditindas. FPI memiliki perhatian yang serius

---

<sup>7</sup> Ibid Risalah Historis dan Garis Perjuangan FPI dalam Saeful Anwar hal 228

<sup>8</sup> Ibid hal 224

terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah terhadap umat Islam seperti kasus Tanjung Priok, Haur Koneng, Lampung, Aceh, Ambon, Poso dll. Disamping itu FPI perlu terlibat dalam kontrol sosial yang semakin lemah pasca Orde Baru tumbang, hingga terjadi kerusuhan, kejahatan, kemaksiatan yang merajalela tanpa tindakan tegas dari pemerintah. Maka FPI perlu menjadi pelopor untuk membendung proses reformasi yang membahayakan umat Islam<sup>9</sup>.

Jadi lahirnya FPI karena pola hubungan atau pemberlakuan negara pada masa orde baru terhadap umat Islam, kemudian adanya ruang keterbukaan atau kebebasan berorganisasi yang didapatkan pada masa reformasi. Menurut Nurcholis Madjid munculnya FPI adalah sebagai ledakan partisipasi dalam era reformasi. Dimana saat elemen masyarakat lain menyerukan reformasi politik, ekonomi atau hukum, FPI mungumandangkan slogan yang mereka sebut sebagai reformasi moral. Dalam pandangan Habib Rizieq krisis bangsa Indonesia itu berpangkal dari krisis moral<sup>10</sup>.

Pertanyaan berikutnya bagaimana dengan gerakan yang dikatakan sebagai gerakan radikal. Menurut Thoha Hamim, munculnya gerakan radikal Islam di Indonesia, terutama FPI, dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan militan yang terjadi di Timur Tengah dan negara-negara lain. Antara lain: *Jabhat al-Tahrrr al-Falistini* di Palestina, *Palestini Libration Front* (PLF) di Palestina, *Moro National Libratiaon Front* (MNLF) di Philipina, Pasukan Ababil, dan Laskar Jundullah di Jakarta, yang mana organisasi tersebut bergerak secara militan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah penguasa<sup>11</sup>.

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 dalam situasi politik yang sedang mengalami perubahan tersebut, muncul dan berkembang gerakan-gerakan sosial dan keagamaan, baik yang menuntut perubahan politik maupun gerakan-gerakan sosial dan keagamaan di daerah-daerah yang menuntut keadilan ekonomi politik. Aktor baru ini berbeda dengan aktor gerakan Islam

---

<sup>9</sup> Dalam S Yunanto, dkk, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan The Ridep Institute, 2003, hal 129

<sup>10</sup> Dalam Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI, Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, Nun Publisher, Jakarta, 2008, hal 25

<sup>11</sup> Opcit dalam Saeful Anwar hal 227

lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al Irsyad, al Wasliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Organisasi gerakan Islam baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam sebelumnya, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif dengan visi dan misi mewujudkan penerapan syari'at Islam secara menyeluruh, sehingga memperoleh keberuntungan hidup dunia-akhirat dan membawa rahmat bagi bangsa Indonesia<sup>12</sup>.

Golongan Islam yang ada dalam bingkai Gerakan Salafi Militan memang tidak sempat berkembang pada masa rezim Orde Baru yang otoriter. Namun, di masa pemerintahan Habibie, gerakan-gerakan militan itu bebas mengembangkan eksistensi dan misinya. Dalam kenyataannya, di bawah pemerintahan Habibie kebebasan pers dan hak-hak sipil berkembang luas, sehingga memberikan sumbangan signifikan dalam memperkuat masyarakat sipil. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Presiden Habibie dan berbarengan dengan eforia gerakan reformasi, Islam politik tampak ingin mengambil momentum<sup>13</sup>.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa lahirnya FPI tidak bisa dilepaskan dari sikap represif pemerintah pada masa orde baru terhadap kelompok umat Islam, serta banyaknya pelanggaran HAM, kemudian permasalahan kemaskitan yang banyak terjadi, namun negara terkesan lamban bahkan tidak bertidak maksimal dalam mengatasinya, serta era keterbukaan dan kebebasan berkumpul dan berserikat yang terbuka pasca reformasi juga mendorong banyaknya organisasi kemasyarakatan yang terbentuk termasuklah diantaranya FPI.

### **Tujuan Perjuangan Front Pembela Islam**

Merujuk pada Keputusan dan Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam Tahun 2013 di Wisma Haji Kota Bekasi, Provinsi Jawa

---

<sup>12</sup> Wahyuni, *Gerakan Sosial Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2014, hal.7.

<sup>13</sup> M Syafi'i Anwar, "Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan di Indonesia", Pengantar dalam M Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. xiii

Barat, tanggal 15 – 17 Syawwal 1434 H atau 22 – 24 Agustus 2013 M<sup>14</sup>. Dalam Pasal 6 anggaran dasar FPI dijelaskan bahwa Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da'wah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.

Dalam anggaran rumah tangga FPI dijelaskan bahawa pengertian visi dan misi. Pertama arti Penerapan syariat secara Kaffah adalah penerapan syariat Islam diseluruh bidang kehidupan yaitu akidah, ibadah, munakahat, muamalat dan jinayat. Arti Penerapan Syariat Islam secara Kaffah adalah kewajiban menjalankan syariat Islam secara individu, dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kedua, arti Khilafah Islamiyyah adalah diterapkannya kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan dan hukum di dunia Islam.

Masih dalam pasal 6 anggaran rumah tangga FPI, bahwa FPI harus ikut berperan aktif dalam upaya menegakkan Khilafah Islamiyyah 'Alamiyyah sesuai Syariat Islam, melalui langkah-langkah logis realistis yang elegan dan bertanggung-jawab, serta sejalan dengan nafas kemajuan dunia, antara lain :

- a. Mendorong peningkatan fungsi dan peran Organisasi Konferensi Islam (OKI).
- b. Mendorong pembentukan parlemen bersama dunia Islam.
- c. Mendorong pembentukan pasar bersama dunia Islam.
- d. Mendorong pembentukan pakta pertahanan bersama dunia Islam.
- e. Mendorong penyatuan mata uang dunia Islam.
- f. Mendorong penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam.
- g. Mendorong kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam.
- h. Mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam.
- i. Mendorong pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam.
- j. Mendorong pendirian Mahkamah Islam Internasional.

---

<sup>14</sup> Secara lebih lengkap bisa dilihat dalam Keputusan dan Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam Tahun 2013 di Wisma Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, tanggal 15 – 17 Syawwal 1434 H atau 22 – 24 Agustus 2013 M

Merujuk pada AD/ART tangga hasil Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam Tahun 2013 ini tergambar bahwa mimpi besar FPI adalah ingin menerapkan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da'wah, penegakan amar ma'ruh nahi mungkar dan pengamalan jihad, dimana kewajiban menjalankan syariat Islam dibebankan pada individu muslim, dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jadi kalau dilihat dari AD/ART FPI mendorong untuk terwujudnya nilai-nilai ke Islaman pada umat muslim. Pada posisi ini FPI yang bersatus hanya sebagai organisasi kemasyarakatan tidak akan optimal untuk bisa mewujudkan akan ini, karena tidak memiliki kewenangan yang kuat apa lagi memaksa umat muslim untuk bisa menjalankan apa yang dicitakan dalam AD/ART ini. Poinya pada posasi sebagai organisasi kemasyarakatan maka posisinya hanya sebatas memfasilitasi, mendorong, mengajak atau menghimbau saja.

Disisi lain ada target eksternal FPI ingin menjadikan Khilafah Islamiyyah adalah diterapkannya kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan dan hukum di dunia Islam. Target eksternal juga akan sulit diwujudkan oleh FPI pada posisi sebagai organisasi kemasyarakatan karena terkaiat dengan hubungan antara negara. Ditambah lagi dengan posisi dan peran FPI dalam kontek organisasi Islam di Indonesia dan dalam kancah internasional relative baru, maka pengaruhnyapun tidak akan signifikan. Berbeda dengan organisasi Islam yang sudah lama dan besar seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, maka peran dan pengaruhnya jauh akan lebih signifikan dalam kontek nasional maupun global.

#### **D. Pola Gerakan Front Pembela Islam**

Prinsip gerakan atau perjuangan FPI tidak bisa dilepaskan dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Secara etimologis, amar bararti suruh, perintah. Sedangkan ma'ruf berarti kebaikan. Maka jika pengertian keduanya digabungkan, maka artinya adalah perintah kepada kebaikan atau kebajikan. Sedangkan amar



ma'ruf secara terminologis adalah: segala perbuatan manusia yang dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhan.

Nahi menurut bahasa adalah larangan, menurut istilah yaitu suatu lafaz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Munkar adalah lawan dari ma'ruf yaitu durhaka, perbuatan munkar adalah perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan. Sedangkan Nahi Munkar secara terminologis adalah: Segala sesuatu yang dianggap buruk dan dibenci oleh syari'ah. Jika pengertian keduanya digabungkan menurut etimologis adalah bermaksud melarang perbuatan durhaka atau perbuatan melanggar peraturan.

Konsep amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan dua konsep utama dalam gerakan FPI. Apapun yang mereka lakukan berupa kegiatan pengajian atau aksi di jalanan, tidak bisa dilepaskan dari dua konsep ini.

Paling tidak ada empat katagori perbuatan ma'ruf dan munkar yang definisikan oleh FPI yaitu ; pertama, katagori penyakit masyarakat (kemaksiatan), di antaranya premanisme, minuman keras, perjudian, pelacuran, narkoba, pornografi, dan pornoaksi. Kedua, katagori penyimpangan agama, di antaranya pelecehan agama, praktik perdukunan, penyimpangan aqidah, pemurtadan, sekularisme, pluralisme, ketidakpedulian pada agama dan umat Islam, serta penolakan aplikasi syari'ah. Ketiga, katagori ketidakadilan dan kezaliman, di antaranya penculikan aktivis FPI dan fitnah. Keempat, kategori sistem non-Islam, yaitu: *nation state*, ekonomi sosialis/kapitalis<sup>15</sup>.

Menurut Habib Rizied Shihab FPI berpandangan bahwa kemaksiatan telah menjadi senjata penghancur yang digunakan kekuatan asing untuk memporak-porandakan Indonesia. Kekuatan kapitalisme internasional yang dimotori Amerika Serikat dan Eropa barat secara terang-terangan menjadikan kekuatan Islam sebagai ancaman serius terhadap kepentingan mereka<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Jamhari dan Jahroni, Jajang. Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 129

<sup>16</sup> Dalam Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI, Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, Nun Publisher, Jakarta, 2008, hal 189

Maka dalam pandangan Habib Rizied Shihab ada paradigma konspirasi yang dilakukan oleh Barat dalam upaya mengganggu eksistensi Indonesia dan umat Islam. Ada lima pola konspirasi yang dilakukan yaitu <sup>17</sup>;

1. Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Untuk menghadapi ini, barat mendanai gerakan Kritisnisasi di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan kuantitas antara muslim dan Kristen
2. Indonesia negeri muslim yang paling luas wilayahnya. Untuk menghancurkan ini Barat berperan aktif dalam proses lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Barat juga membantu Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka. Jika gerakan separatis berhasil Indonesia menjadi negara kecil dan lemah.
3. Indonesia negeri muslim yang terkaya hasil alamnya. Untuk mengrogotinya maka perusahaan Barat mengeruk secara berlebihan SDA Indonesia.
4. Indonesia negeri muslim yang paling strategis letak geografisnya. Oleh sebab itu Barat selalu menghalangi perkembangan di Indonesia.
5. Indonesia negeri muslim yang paling demokratis, sehingga dakwah Islam bisa berjalan lancar. Untuk menyaingi amar makruf dan nahi mungkar, Barat melakukan sebaliknya amar mungkar nahi makruf.

Dalam anggaran rumah tangga struktur Dewan Pimpinan Pusat FPI terdiri dari ; Imam Besar sebagai Pimpinan Tertinggi, Majelis Syura yang dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris dan lima orang Ketua Dewan Tinggi Front, yaitu : Dewan Syari'at, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas. Berikutnya Dewan Tanfidzi yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum yang dibantu beberapa Wakil Sekretaris Umum,

---

<sup>17</sup> Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI, Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, Nun Publisher, Jakarta, 2008, hal 184-186

Seorang Bendahara Umum yang dibantu beberapa Wakil Bendahara Umum, Lima Badan Khusus, Lima Lembaga Otonom, dan empat anak Organisasi<sup>18</sup>.

Lima Badan Khusus terdiri dari Badan Investigasi Front (BIF), Badan anti-Terror Front (BAT), Badan Pengkaderan Front (BPF), Badan Ahli Front (BAF). Dan Badan Amil Zakat (BAZ). Kemudian lima Lembaga Otonom ; Lembaga Pemantau Ma'siat Front (PMF), Lembaga Da'wah Front (LDF), Lembaga Ekonomi Front (LEF), Lembaga Bantuan Hukum Front (BHF), Lembaga Kemanusiaan Front Bernama Hilal Merah Indonesia (HILMI). Empat anak organisasi yang otonom dan independen serta memiliki struktur organisasi, garis komando yaitu ; Laskar Pembela Islam (LPI ), Mujahidah Pembela Islam (MPI), Serikat Pekerja Front (SPF ) dan Front Mahasiswa Islam (FMI).

Secara organisasi banyak bidang atau lingkup kerja FPI secara organisasi namun yang mampak dan terpublikasi secara massif ke publik terkait dengan FPI adalah sejumlah aksi yang melibatkan massa dalam bentuk protes demonstrasi, razia dan ajakkan melakukan boikot terhadap apa yang mereka tentang. Andri Rosadi pernah memetakan tentang strategi amar makruf dan nahi mungkar yang dilakukan oleh FPI.

### Strategi Amar Makruf dan Nahi Mungkar FPI

Konsep	Kategori	Respond dan Strategi	Sasaran Lokasi
Penyakit masyarakat	Miras, judi, pelacuran, narkoba, pornografi, premanisme, hiburan malam	Razia, penutupan, serangan dan bimbingan	Bandar judi, Lokasi pelacuran, Bandar narkoba, agen/pedagang, Lokasi para preman dan Klub malam dan hotel
Penyimpangan agama	Pemurtadan, perusakan akidah, pelecehan simbol agama dan kartun nabi, sekularisme dan pluralisme	Penutupan gereja dan gerakan anti pemurtadan, peloporan ke polisi, demonstrasi dan penolakan	Kampus Ahmadiyah dan Lia Eden, Dani (Dewa), kedubes AS dan Denmark, JIL, Nucholis Madjid
Sistem non Islami	Penolakan aplikasi syariah, demokrasi, komunisme, zionisme,	Pawai hukum Islam dan demonstrasi, alternative : syura,	MPR dan Kedubes AS

<sup>18</sup> Ibid dalam pasal 8 ART

	ekonomi kapitalis/sosialis dan nation state	penolokan, patroli anti israel dan larangan ziarah dan alternatif : ekonomi negara Islam	
Ketidakadilan/kesewenangan/kezaliman	Sikap Komnas HAM dalam kasus Wiranto, Tuduhan Gusdur terhadap FPI, penolakan aplikasi syariah di negara mayoritas muslim, Golkar Era Orba, kebiadaban Moerdani, kebijakan Soeharto era Orba, Penculikan aktivis FPI, Peristiwa Ambon, Sampit, Poso dan Kupang, pembantaian oleh ninja di Jatim, pengeboman Istiqlal, pencabutan subsidi BBM, kenaikan TDL dan telpon, standar Ganda AS, Inggris dan Australia, penangkapan aktivis dakwah oleh Philipina, tuduhan Lee Kuan Yew Indonesia sebagai sarang teroris	Demontrasi, melapor ke Mapolda Metro Jaya, tuntutan kembali ke Piagam Jakarta, Tuntutan pertanggungjawaban Orba, pengadilan Soeharto, seruan jihad, demonstrasi tuntutan pengiriman laskan dan bantuan kemanusiaan, pembentukan tim investigasi fatwa halal darah ninja, sweeping dan kampanye anti-AS ancaman serangan terhadap asset As dan sekutunya, tuntutan pemutusan hubungan diplomatik protes	Kantor Komnas HAM, Mapolda Metro Jaya, MPR, Aparat hokum, Kedubes AS, Inggris Australia, Flihipina dan Singapura

**Sumber :** olahan Andri Rosadi 2008

Merujuk pada pemetaan yang dilakukan oleh Andri Rosadi hingga tahun 2008 pola gerakan yang dilakukan oleh FPI lebih banyak bersifat mobilisasi massa. Padahal juga banyak aksi lain yang dilakukan FPI melalui dakwah, kegiatan social dan terlibat dalam kegiatan tanggap bencana di Indonesia. Namun yang terpublikasi cenderung pada gerakan yang melibatkan masa yang menentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit masyarakat, penyimpangan agama, system non Islami dan ketidakadilan/kesewenangan/kezaliman.

Dalam perjalanya gerakannya terdapat pro dan kontra terhadap FPI ada kelompok masyarakat yang mendukung gerakan FPI, karena negara dianggap lalai dalam konteks penanganan masalah kemasiatan, tapi ada juga pihak yang kontra terhadap gerakan FPI yang dianggap anarkis dan melanggar aturan dalam menjalankan berbagai aksinya.

Dalam dua tahun terakhir ini gerakan FPI kembali mrenkuat pasca adanya peristiwa Pulau Seribu, saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama

(Ahok), saat berpidato tanggal 27 September 2016 yang terkait dengan penistaan agama Islam tentang Surat Al Maidah 51. Pasca itu nadi gerakan FPI kembali menguat, hingga saat ini.

### **Konsep Negara Islam**

Dalam pembahasan tentang tujuan perjuangan FPI pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da'wah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad. Yang dibagi dalam penerapan syariat Islam diseluruh bidang kehidupan yaitu akidah, ibadah, munakahat, muamalat dan jinayat serta dalam kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan dan hukum di dunia Islam. Maka pertanyaan apa yang difahami tentang Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah. Penulis tidak mendapatkan dokumen atau informasi yang memadai tentang konsep atau pandangan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah dalam perspektif FPI.

Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah (Khilafah ala Nabi) adalah nama umum bagi bentuk khilafah yang dicita-citakan oleh kaum muslimin yang merujuk pada masa kepemimpinan nabi Muhammad Saw dan zaman Khulafa al-Rasyidin. Dalam sub bab ini akan digambar secara singkat tentang beberapa pandangan tentang konsep negara Islam.

Berbicara tentang konsep negara Islam tidak bisa dilepaskan dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal tahun pertama atau 622 M. Menurut Antony Black sejak peristiwa hijrah ini muncul tentang pemikiran politik Islam yang berbeda dari pemikiran politik sebelumnya, pemikiran politik Islam ini sebenarnya sudah mulai sejak peristiwa baiat aqabah pertama dan kedua, sejak peristiwa ini gerakan-gerakan politik telah terkoordinasi di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW<sup>19</sup>. Maka sejak peristiwa ini posisi Nabi Muhammad tidak saja sebagai kepala agama tetapi juga sebagai pemimpin umat.

---

<sup>19</sup> Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam, Sejarah, Praktik dan Gagasan*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 36

Secara politik legitimasi kepemimpinan dalam konteks negara Islam ini semakin kuat ketika adanya Piagam Madinah. Menurut Munawir Sjadzali menyatakan bahwa banyak ahli ilmu politik Islam berpendapat bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam pertama yang didirikan nabi di Madinah<sup>20</sup>. Ibnu Hisyam menyebut Piagam Madinah ini dengan *al-Shahifah*, Muhammad al-‘Aid al-Khathrawi menyebut dengan istilah al-Dustur al-Madaniy, Muhammad al-Sayyid al-Wakil menyebut Piagam Madinah dengan al-Mu’ahad. C. W. Motgomery Watt menyebut Piagam Madinah dengan sebutan *The Contitution of Madina*, R.A. Nicholson menyebutnya *The Charter*, Majid Khadduri menyebutnya *The Treaty*, Philip k. Hitti menyebutnya *The Agreement*<sup>21</sup>.

Dari 48 poin yang diatur dalam Piagam Madinah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian<sup>22</sup> ;

1. Aturan-aturan yang mengatur secara khusus terkait orang-orang Islam Muhajirin dan Anshar.
2. Aturan-aturan yang mengatur secara khusus terkait orang-orang Yahudi yang terdiri dari berbagai etnik
3. Aturan-aturan yang diberlakukan secara umum meliputi seluruh warga Madinah.

Maka dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa kehadiran nabi di Madinah dalam konteks kemasyarakatan tidak hanya mengatur umat muslim tapi juga mengatur umat yang non muslim. Maka Nabi Muhammad menjadi pemimpin bagi semua elemen masyarakat yang ada di Kota Madinah kala itu. Pertanyaanya adalah bagaimana pola kepemimpinan nabi dalam mengelola Kota Madinah.

Dalam Piagam Madinah tidak ada pernyataan yang menggunakan kata Islam sebagai dasar negara. Karena jika menggunakan kata Islam maka berpotensi menimbulkan masalah hubungan antara masyarakat muslim dan yang non muslim yang memiliki keyakinan sendiri. Maka negara Madinah tidak didasarkan

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 58

<sup>21</sup> Ibid, hal 57-58

<sup>22</sup> Ibid, hal 58

secara tertulis kepada dasar Islam, meskipun dalam realitasnya Madinah yang dibangun Nabi Muhammad dan diteruskan oleh Khulafa al-Rasyidin dinyatakan sebagai negara Islam dalam praktiknya<sup>23</sup>. Maka dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi dasar yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antara elemen masyarakat Madinah yang plural dan majemuk.

Pertanyaan berikutnya bagaimana bentuk negara pasca nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 M. jika merujuk pada pendapat Saidi Abu Jayb dan John L Esposito menegaskan tidak ada secara tegas tentang bentuk negara yang ditinggalkan pasca wafatnya nabi. Saidi Abu Jayb mengatakan Nabi Muhammad tidak ada meninggalkan wasiat tentang siapa di antara sahabatnya yang akan mengantinkanya sebagai pemimpin umat, termasuk juga tidak mewariskan tentang tata cara atau mekanisme pemilihan calon pengantinya<sup>24</sup>. John L Esposito mengatakan Nabi Muhammad tidak menetapkan model atau bentuk pemerintahan (negara) seperti apa yang harus dianut oleh umat Islam dikemudian hari<sup>25</sup>.

Untuk menjelaskan tentang hubungan negara dan agama dalam sejarah politik Islam, terdapat tiga bentuk pemikiran politik Islam yaitu paradigme integralistik, simbiotik dan sekuleristik<sup>26</sup>.

**a. Paradigma integralistik (*integrated paradigm*)<sup>27</sup>**

Dalam pemikiran ini hubungan agama (Islam) dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Menurut ini pemikiran ini, pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (*devine sovereignty*), dengan kekuasaan negara tertinggi berada pada tuhan.

Paradigma ini didukung oleh kelompok Syiah dan beberapa pemikir Islam seperti Abu al-A'la Al Maududi dan Sayyid Quthb. Dalam Abu al-A'la Al

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 65

<sup>24</sup> Ibid, 2018, hal 76

<sup>25</sup> Ibid, 2018, hal 76

<sup>26</sup> Eddy Asnawi, *Negara dan Islam Perbandingan Kedudukan Islam dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunai Darussalam dan Indonesia*, Hama Media, Yogyakarta, 2013, hal 24

<sup>26</sup> Ibid, hal 24

<sup>27</sup> Ibid, hal 24-31

Maududi ; pertama Islam adalah agama yang sempurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan politik, artinya dalam Islam terdapat pula sistem politik. Kedua, kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah. Ketiga, system politik Islam adalah system politik yang universal dan tidak mengenal batas-batas wilayah, ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan. Model yang dirujuk pada paradigma integralistik ini merujuk pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan masa khulafa al Rasyidin.

**b. Paradigma Simbiotik (*Symbiotic Paradigm*)<sup>28</sup>**

Dalam paradigma ini menjelaskan hubungan agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Paradigm ini bisa dilihat dalam pemikiran Al Mawardi, Al Gazali, Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh.

Dalam pandangan Al-Mawardi muncul dengan konsep Imamah, yaitu sebuah konsep dimana negara dipimpin oleh seorang pemimpin baik Raja, atau pun penguasa lainnya. Intinya Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara dan mengatur dunia. Dalam pandangan Al Gazali pembentukan khilafah adalah wajib syar'i, bentuknya lahir dari proses kesepakatan (*ijmak*) umat. Al Gazali merumuskan teori hubungan antara agama dan politik sangat dekat dan saling mempengaruhi. Agama adalah dasarnya dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Jadi kekuasaan sangat diperlukan untuk menjamin ketertiban dunia. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Muhammad Abduh, dimana dalam Islam tidak mengenal adanya kekuasaan. Maknanya, pertama, Islam tidak memberi kepada seseorang atau kelompok orang untuk menindas orang lain atas nama agama atau berdasar mandate dari agama atau dari tuhan. Kedua, Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 31-36



dan urusan keagamaan orang lain. Ketiga, Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksa pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain. Muhammad Abduh tidak sefaham dengan pemikiran yang mengatakan bahwa raja atau khalifah itu merupakan mandat dari Allah dan karenanya bertanggung jawab kepada Allah pula. Dalam pandangan Abduh Khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentian merupakan hak manusia atau rakyat dan bukan hak Tuhan<sup>29</sup>.

**c. Paradigma Sekuleristik (*secularistic paradigm*)<sup>30</sup>**

Dalam paradigma ini menghendaki pemisahan antara agama dan negara. Pada dasarnya paradigma sekuleristik menolak dasar negara Islam. Sejumlah ahli pikir Islam yang mendukung paradigma ini antara lain Ali Abd al-Razid dan Thaha Husein. Dalam pandangan Ali Abd al-Razid Islam hanya sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara. Islam tidak mempunyai kaitan dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, menurutnya khulafaur rasyidin bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau Islam tapi hanya sebuah sistem dunia.

Thaha Husein juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda, yaitu politik dan agama adalah sesuatu yang terpisah. Pembentukan pemerintah atau negara adalah atas dasar manfaat amaliah bukan atas dasar agama. Menurut Al Quran tidak mengatur sistem pemerintahan, baik secara umum maupun khusus. Maka menurut dia pemerintahan pada masa nabi maupun pada masa khulafaur rasyidin bukanlah pemerintahan yang didasarkan wahyu melainkan pemerintahan manusia.

Dari pola hubungan negara dan agama di atas maka konsep negara dan Islam dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu formal dan substantif. Pendekatan formal melihat Islam memiliki konsep tertentu mengenai negara. Pada pendekatan formal cenderung mementingkan bentuk dari pada isi. Pada pendekatan ini bercirikan ; Islam harus menjadi dasar negara, syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik pada kekuasaan Tuhan, gagasan negara bangsa

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 36

<sup>30</sup> Ibid, hal 36-39

bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan dan mengakui adanya prinsip syura (musyawarah) dalam Islam berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenakan dalam politik barat<sup>31</sup>.

Sedangkan dalam pendekatan substantial memiliki anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu mengenai negara, tetapi hanya memberi-prinsip berupa etika dan moral. Ciri-ciri dari pendekatan ini adalah ; Islam tidak meletakkan pola baku teori negara atau sistem politik dalam Islam, bahwa istilah negara (dawlah) pun tidak ditemukan dalam Al Quran. Jadi pada pendekatan ini bukan pada pelebelan negara Islam, namun dalam bagaiman nilai-nilai dalam Islam bisa dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>32</sup>.

Pada kasus Indonesia dalam pandangan penulis akan lebih relevan digunakan hubungan negara dan Islam dari pendekatan substantial. Dimana tidak perlu adanya pelebelan secara langsung tentang dasar negara berdasarkan Islam. Karena dalam catatan sejarah upaya perjujukan ini sudah dilakukan beberapa kali mulai dari awal kemerdekaan dalam perumusan dasar negara, kemudian dalam dinamika perdebatan sidang-sidang Konstituante 1955-1959, dan terakhir dalam amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Dimana ada dua partai Islam yang mendukung yaitu PBB dan PPP yang memandang perlu Piagam Jakarta dimasukkan dalam pasal 29 UUD 1945<sup>33</sup>.

Tidak hanya partai Islam beberapa organisasi kemasyarakatan maupun organisasi mahasiswa atau pemuda yang mendukung upaya tersebut. Organisasi tersebut antara lain ; Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam Antar Kampus (HAMMAS), Pergerakan Islam Untuk Tanah AIR (PINTAR), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komunikasi Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam

---

<sup>31</sup> Ibid, hal 39-40

<sup>32</sup> Ibid, hal 39-40

<sup>33</sup> Lili, Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Parta-Partai Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar dan LIPI, 2006, hal 196

(KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Ikatan Keluarga Muslim Internasional (IKMAL)<sup>34</sup>.

Dinamika ini selalu mendapat perlawanan atau penentangan dari kelompok non Islam ataupun dari kelompok Islam yang nasionalis. Dalam pandangan pendekatan substansial lebih pas dan kondusif bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini. Secara faktual nilai-nilai ke Islam sudah banyak yang terakomodir dalam berbagai aturan dan kebijakn di Indonesia. Hal ini bisa dilihat seperti ; aturan tentang perkawinan, pengadilan Agama Islam, mengenai zakat, pengaturan tang produk halal, perbankan syariah dll. Maka dalam konteks pendekatan substansial dimungkin banyak hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ke Islam untuk bisa diperjuangkan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **F. Penutup**

Dari uraian artikel ini dapat disimpulkan beberapa hal, pertama, bahwa terbetuknya FPI adalah respon terhadap kondisi bangsa terutama terkaiat dengan permasalahan moral kemasyaratan yang turun (kemaksiatan), perkembangannya secara organsasi kuat pada awal reformasi karena rendahnya lambanya respon neagara dalam menyikapi permasalahan kemaksiatan dan penyimpangan ajaran Islam.

Kedua, pada pola gerakan FPI lebih dominan dalam menunjukkan sikap organisasinya yang lebih banyak terpublikasi dalam bentuk mobiliisasi masa melalui unjuk rasa, protes atau demonstrasi. Gambaran tentang Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah yang menjadi visi dan misi FPI tidak tergambar secara komprehensif ke publik. Ketiga dalam pola relasi antara negara dan Islam dalam pandangan penulis untuk kondisi Indonesia akan relevan dan kondusif melalui pendekatan substansial bukan pendeakatan formal.

---

<sup>34</sup> *Op cit* Lihat dalam, Romli, Lili, 2006, hal 227-220, meskipun data terkini tentu harus di update apakah organisasi ini masih mendukung untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara, karena data ini adalah data pada tahun 2000, namun secara faktual hari ini adalah sejumlah organisasi masih komit dan semangat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara diantara Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meskipun ini sudah dibubarkan oleh pemerintah

### Daftar Pustaka

- Aly, Sirojuddin, *Pemikiran Politik Islam, Sejarah, Praktik dan Gagasan*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Anwar, Saeful, *Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'ruh Nahy Mungkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2014; issn 2088-7957; 220-250
- Asnawi, Eddy, *Negara dan Islam Perbandingan Kedudukan Islam dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunai Darussalam dan Indonesia*, Hama Media, Yogyakarta, 2013
- Huda, Khoirul, *Fenomena Pergeseran Konflik Pemikiran Islam Dari Tradisionalis Vs Modernis Ke Fundamentalis Vs Liberalis*, Jurnal ISLAMICA, Vol. 3, No. 2, Maret 2009
- Keputusan dan Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam Tahun 2013 di Wisma Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, tanggal 15 – 17 Syawwal 1434 H atau 22 – 24 Agustus 2013 M*
- Jamhari dan Jahroni, Jajang. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Khakim, Nur, *Islam : Doktrin Pemikiran dan Realitas Historis*, Adintya Press, Yogyakarta, 2002
- Mubarak , M Zaki, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2008
- Muzani, Saiful, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1993
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1980), lihat dalam bagian pendahuluan
- Romli, Lili. *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Parta-Partai Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar dan LIPI, 2006
- Rosadi, Andri, *Hitam Putih FPI, Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, Nun Publisher, Jakarta, 2008
- S Yunanto, dkk, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan The Ridep Institute, 2003
- Wahyuni, *Gerakan Sosial Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2014